



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumarni binti Sunardi, Tempat tanggal lahir 14 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama **Nabila Rahma Fitriani binti Candra**, tempat tanggal lahir, Pekan Baru 27 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Putra Agung Sukur bin Antoni**, tempat tanggal lahir Air Dikit, 16 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Nabila Rahma Fitriani binti Candra**, baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor 403/kua/07.05.01/PW.01.2/09/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah berlangsung cukup lama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta anak Pemohon sudah tidak mau sekolah lagi dan memilih untuk menikah, persiapan rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja swasta, operator alat berat, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Jumarni binti Sunardi**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Nabila Rahma Fitriani binti Candra** dengan laki-laki yang bernama **Agung Sukur bin Antoni**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih berusia dibawah umur, dan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Oktober 2020 dengan Register Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal 13 Oktober 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Agung Sukur bin Antoni;
- Bahwa, yang akan bertindak sebagai wali nikah anak Pemohon adalah wali Hakim karena Ayah kandung anak Pemohon dan wali nasab lainnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan keluarganya juga telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan antara keduanya, kecuali umur anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon menyadari resiko dan dampak dari perkawinan dini Anak Pemohon terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Nabila Rahma Fitriani binti Candra di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Februari 2005, dan baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif, serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan telah mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, dan tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali oleh calon suami anak Pemohon, serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Agung Sukur bin Antoni di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Mei 1998 dan telah berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang meminang wanita lain, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa, hubungan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sanggup membimbing anak Pemohon, untuk menjadi isteri yang baik serta calon suami anak Pemohon telah mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik keberadaan anak Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua (Ayah) calon suami anak Pemohon yang bernama **Antoni bin Saiban** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, benar keduanya mau menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan antara keduanya, kecuali umur anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon suami anak Pemohon tidak sedang meminum wanita lain;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon menyadari resiko dan dampak dari perkawinan dini Anak Pemohon terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun karena hubungan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya menjalankan syariat Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dengan Nomor : 403/kua/07.05.01/PW.01.2/09/2020, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta cerai nomor 0230/AC/2019/PA.Mkm, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon **Jumarni** Nomor 1706025406840002, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jumarni** dengan Nomor 1706022006070011, tanggal 22 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.4);

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nabila Rahma Fitriani** nomor 477/207/AK/UM/MM/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon **Putra Agung Sukur** Nomor 1706141305980002, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.6);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. **Heru Minarno bin Marmin**, saksi menerangkan dibawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Agung Sukur bin Antoni, tetapi ditolak Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha membujuk anak Pemohon agar bersabar menikah dengan calon suaminya karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah dan mengingat dampak-dampaknya, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang akan menikahkan anak Pemohon adalah wali hakim karena ayah kandungnya dan wali nasab yang lainnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;
- Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak 2 bulan terakhir dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan keduanya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon adalah seorang wanita baik-baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
- Bahwa, anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat seperti shalat dan kewajiban syariat Islam lainnya;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon menerima baik keberadaan calon suami anak Pemohon;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya aktivitas seorang Ibu rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa, saksi merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akan mendapatkan permasalahan di kemudian hari terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum serta administrasi kependudukan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama;

2. **Suwarno bin Sardi**, saksi menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan anak Pemohon selaku calon mempelai wanita;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA setempat karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 22 tahun, akan tetapi calon mempelai wanita baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi telah berusaha membujuk calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon agar bersabar untuk menikahi anak Pemohon yang masih di bawah umur mengingat dampak-dampaknya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi yang akan menikahkan anak Pemohon adalah wali hakim karena ayah kandungnya dan wali nasab yang lainnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, setahu saksi antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah, dan keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang memininang wanita lain dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, pernikahan antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa, hubungan antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari KUA untuk menikahkan keduanya, karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat dan kewajiban syariat Islam yang lain;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon menerima baik keberadaan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, keduanya tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai serta orangtua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, kedua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, dan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut diatas gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Nabila Rahma Fitriani binti Candra karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko untuk melangsung pernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 27 Februari 2005 sedangkan menurut perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan yang begitu erat, dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui rencana perkawinan tersebut, sedangkan hubungan antara keduanya telah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah (Model N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, oleh karenanya Hakim tunggal menilai bahwa secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan yang sah, meskipun Pemohon telah bercerai secara resmi dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari dua orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon belum berumur 19 tahun karena lahir pada tanggal 27 Februari 2005, dan baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan menjalankan kewajiban syariat Islam selaku muslim;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki masing-masing telah menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai, serta Pemohon bersedia menjadi wali nikah dari anak Pemohon;
- Bahwa, Hakim Tunggal, kedua orang tua calon mempelai dan para saksi telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niat keduanya untuk menikah di usia anak Pemohon yang masih dini, mengingat kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nabila Rahma Fitriani binti Candra untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Agung Sukur bin Antoni;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua pihak calon mempelai baik pria ataupun wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Anak Pemohon ketika permohonan *a quo* dikabulkan masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan *a quo* tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Februari 2005 sehingga dihitung hingga

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan, oleh karenanya masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami anak Pemohon didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, maupun sesusuan, bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa anak Pemohon hanya punya keinginan untuk menikah, sedangkan anak-anak lain pada usia sebaya anak Pemohon masih menempuh pendidikan, sedangkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati anak Pemohon untuk menunda perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan keduanya untuk menikah di usia muda namun tidak berhasil, serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Pemohon secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah tangga yang didukung oleh penerimaan keluarga calon suami anak Pemohon atas anak Pemohon secara baik, hal mana menunjukkan bahwa anak Pemohon telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan anak Pemohon yang sudah tidak bersekolah lagi dan bersikeras ingin segera menikah, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para *fuqoha* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika : 1). Ada keinginan yang kuat untuk menikah; 2). Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; 3). Mampu secara ekonomi; 4). Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan terus menerus melakukan zina dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami anak Pemohon sebagai tukang pangkas rambut yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh anak Pemohon di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :*“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat membahayakan kedua calon mempelai dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Agung Sukur bin Antoni) dan calon mempelai wanita (Nabila Rahma Fitriani binti Candra), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Jumarni binti Sunardi**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Nabila Rahma Fitriani binti Candra** dengan seorang laki-laki yang bernama **Agung Sukur bin Antoni**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Ahmad Ridha Ibrahim., SHI., MH.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fauzi, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim., SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Fauzi, SHI., MH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan dan PNBP | Rp. 110.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Mkm